

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit.....	11
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003	
Tentang Ketenagakerjaan	13
Bab I Ketentuan Umum.....	15
Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan	19
Bab III Kesempatan dan Perlakuan yang Sama	20
Bab IV Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi	
Ketenagakerjaan	20
Bab V Pelatihan Kerja	21
Bab VI Penempatan Tenaga Kerja.....	28
Bab VII Perluasan Kesempatan Kerja.....	31
Bab VIII Penggunaan Tenaga Kerja Asing.....	32
Bab IX Hubungan Kerja.....	35
Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan	43
Bab XI Hubungan Industrial.....	58
Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja	76
Bab XIII Pembinaan	91
Bab XIV Pengawasan	92
Bab XV Penyidikan.....	93
Bab XVI Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif	94
Bab XVII Ketentuan Peralihan.....	97
Bab XVIII Ketentuan Penutup.....	98

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan..... 101

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 149

Bab I	Ketentuan Umum.....	150
Bab II	Asas, Sifat, dan Tujuan	152
Bab III	Pembentukan.....	153
Bab IV	Keanggotaan	155
Bab V	Pemberitahuan dan Pencatatan.....	156
Bab VI	Hak dan Kewajiban.....	158
Bab VII	Perlindungan Hak Berorganisasi.....	160
Bab VIII	Keuangan dan Harta Kekayaan.....	161
Bab IX	Penyelesaian Perselisihan	162
Bab X	Pembubaran.....	163
Bab XI	Pengawasan dan Penyidikan	164
Bab XII	Sanksi	165
Bab XIII	Ketentuan Lain-lain	166
Bab XIV	Ketentuan Peralihan.....	166
Bab XV	Ketentuan Penutup	167

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 169

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 181

Bab I	Ketentuan Umum.....	183
Bab II	Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	187
Bab III	Pengadilan Hubungan Industrial	209
Bab IV	Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial.....	218
Bab V	Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana	228

Bab VI	Ketentuan Lain-lain	231
Bab VII	Ketentuan Peralihan.....	232
Bab VIII	Ketentuan Penutup	233
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		
		235
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		
		259
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		
		263
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour</i> (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)		
		267
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour</i> (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).....		
		271
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit		
		277
Bab I	Ketentuan Umum.....	278
Bab II	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional	279
Bab III	Lembaga Kerja sama Tripartit Provinsi	284

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab IV	Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota	290
Bab V	Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektor	295
Bab VI	Ketentuan Penutup	298

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit	299
---	-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	307
--	------------

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	315
--	-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998	317
---	------------

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998	321
--	-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima Oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten Kota	323
--	------------

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima Oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten Kota	327
---	-----

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.....	329
---	------------

Bab I Ketentuan Umum	330
Bab II Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Tingkat Pemerantaraan.....	335
Bab III Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Panitia Daerah dan Panitia Pusat	340
Bab IV Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian	346
Bab V Ketentuan Peralihan.....	352
Bab VI Ketentuan Penutup	352

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-104A/Men/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri	355
--	------------

Bab I	Ketentuan Umum.....	358
Bab II	Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia	362
Bab III	Pelaksanaan Penempatan	369
Bab IV	Penempatan TKI untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri	392
Bab V	Penempatan TKI dengan Visa Kerja Panggilan	394
Bab VI	Pembinaan, Pelaporan dan Evaluasi	394
Bab VII	Pengawasan	395
Bab VIII	Sanksi	396

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab IX	Ketentuan Lain-lain	404
Bab X	Ketentuan Peralihan.....	404
Bab XI	Ketentuan Penutup	405

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri	407
---------------------------------------	------------

Bab I	Ketentuan Umum.....	408
Bab II	Perlindungan TKI Pra-Penempatan, Masa Penempatan, dan Purna-penempatan.....	409
Bab III	Perlindungan Melalui Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI	419
Bab IV	Program Pembinaan dan Perlindungan TKI.....	421
Bab V	Pelaporan	422
Bab VI	Ketentuan Penutup	422

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri.....	425
--------------------------------------	------------

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh

Pemerintah	433
-------------------------	------------

Bab I	Ketentuan Umum.....	434
Bab II	Tata Cara Pelaksanaan Penempatan TKI	436
Bab III	Perlindungan TKI	445
Bab IV	Ketentuan Peralihan.....	445
Bab V	Ketentuan Penutup	445

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh

Pemerintah	447
-------------------------	------------